

BUPATI PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 253 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2025-2029

BUPATI PADANG PARIAMAN.

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja, serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025-2029;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Konvenan International tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397):
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 359);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Pembentukan dan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Sekretariat.

KEEMPAT

Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Nomor 232/KEP/BPP/2025 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025-2026 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

KEENAM : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian

dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan/Nota Dinas Penunjukan terhiyung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan

Bupati ini.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal 44 Juli 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KASKPDIASISTEN AM
KABAG.HUKUM

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sdr. Inpektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;

2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;

3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 253 /KEP/BPP/2025 TANGGAL 4 JULI 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2025-2029

| Î | 30.00 | | | |
|----------|---|--|---------------------|--|
| | No. | Jabatan Dalam Kedinasan | Kedudukan Dalam Tim | |
| | 1 | Bupati Padang Pariaman | Penanggung Jawab | |
| | 2 | Wakil Bupati Padang Pariaman | Ketua | |
| | 3 | Sekretaris Daerah | Wakil Ketua | |
| | 4 | Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Sekretaris | |
| | 5 | Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Wakil Sekretaris | |
| | 6 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Wakil Sekretaris | |
| | Koordinator Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan sosial | | | |
| | 7 | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Ketua | |
| | 8 | Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | Anggota | |
| | 9 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota | |
| | 10 | Kepala Dinas Kesehatan | Anggota | |
| | 11 | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| | 12 | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Anggota | |
| | 13 | Kepala Dinas Perhubungan | Anggota | |
| | 14 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Anggota | |
| | 15 | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Anggota | |
| DADAE | (OOPD) | Kepala BPJS Kesehatan NASI | Anggota | |
| MAIAE | 115 | Ketua Baznas Kabupaten Padang Pariaman | Anggota | |
| SEK | Koordingtor Kelompok Pengelola Program Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaka Mikro | | | |
| KA.SKPDI | NA IN | sten Perekonomian dan Pembangunan | Ketua | |
| | | Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah | Anggota | |
| | 20 F | Kepala Dinas Perdagangan Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | Anggota | |
| | 21 F | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Anggota | |
| | 22 F | Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | Anggota | |
| | 23 F | Kepala Dinas Perikanan | Anggota | |
| | 24 F | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | Anggota | |
| | | | | |

| 25 | Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | Anggota | | |
|-------------|--|--------------|--|--|
| 26 | Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian | Anggota | | |
| 27 | Assistant Manager of Community Development PT Angkasa Pura II Bandar Udara Minangkabau | Anggota | | |
| 28 | Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Sumatera Barat | Anggota | | |
| 29 | Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Padang Pariaman | Anggota | | |
| Sekretariat | | | | |
| 30 | Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Kepala | | |
| 31 | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat | Wakil Kepala | | |
| 32 | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | Anggota | | |
| 33 | Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Anggota | | |
| 34 | Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Anggota | | |
| 35 | Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Anggota | | |
| 36 | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Anggota | | |
| 37 | Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Anggota | | |
| 38 | Staf Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah | Anggota | | |
| | Penelitian dan Pengembangan Daeran | | | |

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KASKPDIASISTEN
KABAG HUKUM

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS